

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Bachtiar, Herlina Suryati. *Aspek Legal Kredit Sindikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kreditur Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Cetakan-I*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja. *Hak Tanggungan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- ND, Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Rahman, Hasanuddin. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kreditur Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan. Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Program Pascasarjana UNS, 2005.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2015.
- Syahrani, Ridwan. *Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.

B. Jurnal

- Adiyatma, Anton Sofian, Edith Ratna, dan Irma Cahyaningtyas, “Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kantor Pertanahan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik”, *Jurnal Notarius* 14 No.1 (April 2021): 91, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38830>
- Awanto, Titan Rossi dan Susilowardan, “Akibat Hukum Ganti Nama Pemegang Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Tentang Penguatan Sektor Keuangan Bagi Kreditur dan Debitur Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Sukoharjo”, *Customary Law Journal* 1, No.2, (Maret 2024). 3-4, <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2512>.
- Djaman, Aristo, “Kajian Atas Kredit Sindikasi Ditinjau Dalam Hukum Kontrak”, *Lex Privatum* VII, No.5, (Mei 2019): 17, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/26984>.
- Endeng, “Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang”, *Jurnal Hukum Positum* 4, No.1 (Juni 2019): 125, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/index>.
- Gue, Rindi Restu Tanti, “Beberapa Hambatan Pada Eksekusi Hak Tanggungan Untuk Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Kreditur”, *Jurnal Lex Crimen* X, No. 13, (Desember 2021), 116, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38578>.
- Hambali, Amirudin, dan Heriyanti, “Akibat Hukum Kesalahan Penginputan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Online Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang”, *Journal Delik Adptertisi* 1 No.1 (Juni 2022), 26, <https://jurnal.adptertisi.or.id/index.php/jda/article/view/282/203>.
- Honandar, Lidya Nathalia, “Kajian Yuridis Terhadap Kredit Sindikasi Berdasarkan Sistem Perkreditan Perbankan Di Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen* 6, No.9 (November 2017): 93, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/18413>.

Nurdin, Stiawan, “Efektifitas Pelayanan Hak Tanggungan Secara Elektronik Yang Dilakukan Oleh Ppat Dan Kreditur (Bank) (Studi Kasus Pada PPAT Junaidi, S.H., M.Kn. dan PT. BPR Segara Anak Kencana)”, *Jurnal Juridica* 4 No.1 (November 2022): 76, DOI : 10.46601/juridica.v4i1.215.

Nurwulan, Pandam, “Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Bagi Kreditur dan Pejabat Pembuat Akta Tanah”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, No. 1 (Januari 2021): 193. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art9>.

Podung, Detisa Monica, “Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan”, *Jurnal Lex Crimen* V, No.3, (Maret 2016). 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11680>.

Sahnan, M.Arba, dan L. Wira Pria suhartana, “Kewenangan Badan Petanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan”, *Jurnal IUS* VII No. 3 (Desember 2019): 448 <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.714>.

Suroso, Joko Tri, “Kewajiban Dan Akibat Hukum Kreditur Dalam Kredit Sindikasi”, *Jurnal Wacana Paramarta* 21 No.4 (November 2022). 13, <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i4.221>.

Wibawa, Kadek Cahya Susila, “Menakar Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid”, *Jurnal Crepido* 1 No.1 (Juli 2019): 43, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.40-51>.

Wonte, Andreas F., Jemmy Sondakh, dan Harly Stanly Muaja, “Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah”, *Jurnal Lex Administratum* , 10 No. 2 (April 2022): 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/40467>.

C. Laporan Hasil Penelitian

Laturua, Ilham, “Pelaksanaan Perjanjian Pari Passu Terhadap Jaminan Kebendaan Pada Indirect Syndication Perusahaan Modal Ventura”, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2009.

Somayaji, Muhamad Misuari, “*Akibat Hukum Pada Debitur Dan Kreditur Terhadap Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik Yang Tidak Terbit Dan Penyebabnya (Studi Di Kabupaten Pekalongan)*”, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2021.

D. Internet

Khikmawati, Nurul. “Mudahnya Masyarakat Surabaya dalam Melakukan Perbaikan Data Pertanahan”. SwaraNews.com. <https://swaranews.com/baca-1632-mudahnya-masyarakat-surabaya-dalam-melakukan-perbaikan-data-pertanahan-di-tengah-pandemi-covid-19> (diakses 5 Februari 2024).

Rachmadsyah, Shanti. “Kredit Sindikasi”. HukumOnline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kredit-sindikasi-lt4c3e609faff23/> (diakses 2 September 2024).

E. Artikel dari Majalah

Asshiddiqie, Jimly, “Independensi Dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah”, *Majalah Renvoi*, 3 Juni 2003.

F. Peraturan Perundang-undangan

Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893)

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84)

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 349)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6602)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 27)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perkonomian Rakyat